

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Implementasi *European Council Regulation* 1005/2008 dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor PPS Nizam Zachman periode 2019-2021 dilakukan melalui koordinasi antar aktor, mulai dari tingkatan Dewan Uni Eropa, OKL PPS Nizam Zachman, dan UPI. Wujud koordinasi antar aktor dalam implementasi kerja sama ini berpatokan pada Undang-undang No 45 Tahun 2009 dan PermenKP No 10 Tahun 2021 sebagai aturan nasional ratifikasi ECR 1005/2008 di Indonesia. Kerja sama yang terjalin antara ketiga pihak ini masing-masing berperan dalam bidang pengawasan usaha perikanan, pengumpulan data perikanan, edukasi pengelolaan produk perikanan, penjaminan mutu produk perikanan, serta pemasaran dan distribusi produk perikanan.

Peran Dewan Uni Eropa dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor adalah memastikan bahwa produk perikanan yang diimpor ke negara-negara Uni Eropa berasal dari tangkapan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, atau cara konservasi dan pengelolaan yang berlaku, serta memfasilitasi pemenuhan formalitas oleh negara anggota terkait akses ke pelabuhan perikanan. Kontribusi Dewan Uni Eropa di PPS Nizam Zachman meliputi (1) pengawasan aktivitas perikanan ekspor secara *mobile* saat ikan mendarat di negara importir, (2) melakukan inspeksi ke PPS Nizam Zachman untuk meninjau langsung cara penanganan ikan yang dilakukan di pelabuhan, (3) memfasilitasi studi banding pengelolaan perikanan ke negara anggota Uni Eropa, dan (4) menjadi notifikator penerimaan dan penolakan produk perikanan apabila terjadi kegagalan produk perikanan di PPS Nizam Zachman.

OKL PPS Nizam Zachman dalam implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 berperan mengawasi dan mengelola proses sertifikasi hasil tangkap ikan secara langsung melalui pengawasan, pelatihan dan edukasi kepelabuhan

perikanan, pengumpulan dan pemeriksaan data perikanan, serta memastikan aktivitas pemasaran dan distribusi ikan berjalan lancar di lingkungan eksternal. Pada periode 2019-2021, PPS Nizam Zachman beberapa kali melakukan program pelatihan kepelabuhanan dan perikanan yaitu Pelatihan Sertifikasi Operator Radio Marine bagi Nelayan; Pelatihan Resiko Kerja dan Pengenalan Indikator Kerja bagi Awak Kapal Perikanan; dan Pelatihan Peraturan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. PPS Nizam Zachman juga mengembangkan aplikasi pencatatan perikanan terintegrasi, yaitu aplikasi JALASENA, dan menerbitkan SHTI dan CPIB sebagai dokumen pendukung produk ekspor perikanan.

Adapun peran UPI adalah menjadi perusahaan pengolah *raw material* produk perikanan sesuai *request order* negara importir, baik dengan negara Uni Eropa maupun non-Uni Eropa. Pada periode 2019-2021 jumlah UPI yang aktif dan telah tersertifikasi di PPS Nizam Zachman mencapai 102 Unit, dengan Unit Pengolah yang fokus pada pembekuan ikan sebanyak 86 unit, pendinginan ikan 5 unit, pengolahan berbasis lumatan daging ikan 2 unit, fermentasi ikan 1 unit, dan 8 unit lainnya tidak terspesifikasi.

Sinergi antar aktor dalam implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan pasar ikan ekspor, meningkatkan ekonomi maritim, baik di lingkungan lokal, nasional dan global, serta menanggulangi praktik IUU Fiahing di perairan Indonesia.

6.2 Saran

Implementasi ratifikasi *European Council Regulation* 1005/2008 dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan di Pelabuhan Perikanan Nizam zachman (PPS Nizam Zachman) telah terlaksana dengan cukup baik, namun terkait dengan kendala yang ditemui, penulis menyarankan kepada pengelola PPS Nizam Zachman untuk pengembangan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor diperlukan alternatif strategi yang meningkatkan kesadaran aktor-aktor terlibat dalam perdagangan ekspor perikanan tangkap, yaitu dengan

melakukan duplikasi pola aturan negara anggota Uni Eropa yang telah berhasil menerapkan ECR 1005/2008 dengan baik.

Dikarenakan implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman belum memenuhi kriteria perdagangan internasional sempurna, kajian ini sangat terbuka untuk dilakukan penelitian lanjutan, diantaranya dengan melakukan Analisa Hambatan. Penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menekankan analisis perdagangan perikanan tangkap menggunakan teori keunggulan kompetitif indikator sumberdaya manusia, Sehingga diperoleh hasil yang komprehensif terkait cara meningkatkan sertifikasi dan perdagangan komoditas ikan Indonesia ke Uni Eropa.